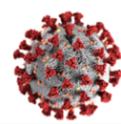


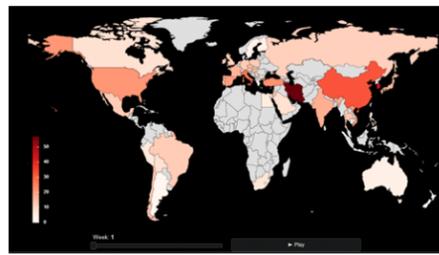
## BATAM DAN POTENSI UKM

*Kesetaraan Gender bukan  
Hanya untuk Perempuan  
Inovasi Baru Sensus Penduduk*





Penulis: Shela Yulfia Hadist



Sumber: Covid Explore

(Seluruh isi dalam tulisan ini adalah tanggung jawab penulis)

Penulis merupakan Mahasiswa di Politeknik Statistika STIS

Di tengah maraknya pemberitaan di media mengenai pandemi, mungkin beberapa kali kita pernah mendapati foto, entah langit “ibukota” yang kembali biru, entah munculnya satwa liar, atau embun pagi yang semakin sejuk di depan rumah.

Rasa penasaran dan pertanyaan seperti “Apakah saat ini keadaan bumi sama saja seperti kemarin, atau sedikit lebih baik?” membuat salah seorang data scientist dari India, Mayukh Bhattacharyya, melakukan penelitian mengenai air quality index (AQI) beberapa waktu yang lalu. Dilansir dari artikel yang ditulisnya di Towards Data

Science, terjadi penurunan polutan yang cukup signifikan di antero dunia.

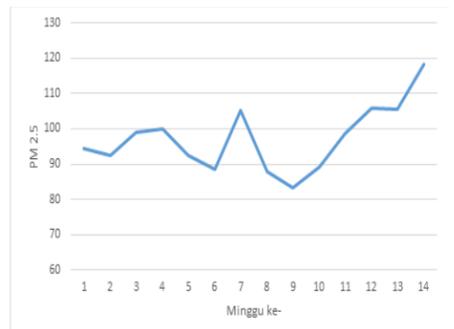
Kedua gambar berikut merupakan persebaran NO2 di seluruh dunia—dengan gambar pertama merupakan situasi pada minggu pertama sementara gambar kedua pada minggu ke-14. Perbedaan tampak signifikan semenjak diberlakukannya kebijakan lockdown di beberapa negara yang menyebabkan traffic levels menurun hingga 35%. Bahkan, dilaporkan BBC, salah satu penelitian di UK menyatakan bahwa level polutan yang berbahaya menurun hingga 60% dibandingkan setahun yang lalu.

Di Indonesia sendiri, beragam “fenomena alam” terlihat dari berbagai pelosok negeri, khususnya wilayah Jabodetabek, mengingat segala mobilitasnya yang tak lepas dari aktivitas transportasi. Namun, data dari Covid Explore membuktikan bahwa meskipun polutan PM2.5 di Indonesia sempat menyentuh angka 80-an, angkanya berfluktuasi dan bahkan cenderung meningkat beberapa minggu terakhir ini.

Berbeda dengan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia seperti transportasi, PM2.5 dihasilkan dari debu tanah kering yang terbawa angin atau proses vulkanis yang berasal dari letusan gunung berapi. Seperti yang telah diinformasikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, serta Kementerian ESDM bahwa telah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada 10 April 2020 pukul 21.58 WIB dan pukul 22.35 WIB. Tidak hanya itu,

di tengah perjuangan menghadapi pandemi Covid-19, di Indonesia saat ini ada tiga gunung aktif dengan status siaga (level III) dan 18 gunung api aktif dengan status waspada (level II).

Pandemi, Covid-19, Corona virus disease, atau apapun itu, pada akhirnya memang memberi dampak mendunia tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga dari ekonomi, pendidikan, hingga moral dan personal. Meskipun begitu, bumi seakan memberi “hadiah” kepada manusia dengan menghadirkan dirinya dengan tampilan yang “lebih baik”.



## BATAM DAN POTENSI UKM

Penulis: Ahmad Mulyadi Harahap



Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi salah satu penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yang diharapkan mampu mengurangi jumlah angka pengangguran dewasa ini. Sektor-sektor real lainnya memang berasal dari UKM dan redistribusi perpajakan.

Melihat perkembangan UMKM kita pasca peralihan pemerintahan dari Orde Baru hingga ke Reformasi saat ini memang merupakan alternatif yang ampuh untuk restrukturisasi kondisi perekonomian nasional.

Krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 adalah awal kebangkitan bagi kelangsungan UMKM yang pada saat itu satu-satunya usaha kerakyatan yang mampu bertahan dengan tekanan kondisi ekonomi global.

Demokrasi ekonomi yang merupakan sistem yang berlandaskan sistem kebebasan dalam melakukan perniagaan yang diharapkan mampu membantu pendapatan rumah tangga

masyarakat menengah ke bawah pada umumnya, dengan berbagai bidang usaha seperti : retail, kuliner, industri rumah tangga, budi daya perikanan, perkebunan dan lainnya.

Bercermin dari krisis ekonomi tahun 1998 yang menimbulkan kemerosotan nilai tukar rupiah mencapai Rp 16,000 ± per dollar AS dengan inflasi yang berada di posisi high inflation selain ditimbulkan oleh iklim politik yang tidak sehat.

Pemerintah dengan berbagai upaya dewasa ini telah melakukan upaya kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin memperluas dan mengembangkan usaha mereka, adapun beberapa program tersebut salah satunya KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan kemudahan perizinan usaha melalui mal pelayanan publik yang telah terealisasi di beberapa kota besar di Indonesia.

Batam adalah salah satunya yang memiliki mal pelayanan publik dengan metode perizinan satu pintu dan

didukung dengan sistem perizinan usaha berbasis online, untuk mempermudah pelaku usaha. Reformasi sistem perizinan usaha ataupun investasi asing memang sudah seyogianya di pangkas dengan segala kemudahannya, begitu yang dilakukan pemerintah.

UMKM Batam sendiri memang berkembang cukup baik, namun yang perlu di waspadi adalah kurangnya tertata dan banyak pelaku usaha kecil yang belum dapat terdata dengan baik oleh pemerintah kota Batam. Contohnya saja pelaku usaha kios kaki lima yang menjajakan makanan di pinggir jalan Batam yang masih belum terlokasi dengan baik. Namun keberadaan-nya memang mempengaruhi rantai perekonomian daerah.

Andai kata memang dapat terdata dengan disiplin dan baik oleh pemerintah, ini akan menjadi sumber pendapatan berupa pajak usaha dan tentunya akan mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Batam. Di Batam juga ada istilah Pasar kaget, pasar yang hanya buka pada setiap hari kamis dan minggu ini menjadi pasar yang ditunggu oleh masyarakat yang pada umumnya.

Itu juga dinilai belum jelas statusnya bagaimana pengawasan-nya oleh pihak pemerintah. Batam memiliki potensi ekspor hasil UMKM yang menjanjikan apabila pemerintah reaktif dalam menolong dan memberikan penanganan lebih intensif kepada pelaku UMKM. Melihat kondisi Batam yang lesu investasi asing di sektor industry berat, dan kondisi saat ini dihadirkan dengan berbagai pembangunan sektor property yang akan berdampak bagi bertambahnya

pengangguran jangka panjang.

Diperlukan program khusus yang mampu merangsang pertumbuhan UMKM di kota Batam untuk dapat menjadikan Batam menjadi kota yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan primer pada umumnya. Salah satunya sektor pertanian yang mana Batam sendiri masih mandatkan berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang berasal dari luar Batam, belum lagi komoditas lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Batam.

Tentu hal ini akan mempengaruhi penetapan harga yang sangat tidak stabil dan menyengsarakan masyarakat rumah tangga berpendapatan menengah kebawah.

(Seluruh isi tulisan ini adalah tanggung jawab penulis)

#janganmudik  
#dirumahnya



# Kesetaraan Gender Bukan Hanya Untuk Perempuan

(Kursi legislatif Kepulauan Riau didominasi laki-laki?)

Oleh: Shela Yulia Hadist

Salah satu isu yang menjadi fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dan menarik bagi saya adalah isu kelima, yaitu Kesetaraan Gender. Isu tersebut menjadi menarik karena bukan hanya membicarakan permasalahan global yang menyangkut kesejahteraan dan kehidupan yang layak, namun karena isu kesetaraan gender membicarakan manusia secara personal menyangkut peran, hak, serta tanggungjawabnya.

Namun, apakah kesetaraan gender hanya berputar di ranah perempuan? Kesetaraan gender dengan membela perempuan tampaknya seringkali menjadi konsumsi publik. Merebaknya gerakan-gerakan dari para wanita yang menuntut kesetaraan dalam peran rumah tangga hingga pekerjaan. Barangkali kita telah lupa bahwa di balik itu semua, laki-laki pun merupakan elemen penting yang seharusnya tidak lepas dari kesetaraan

gender.

Misoginis—kebencian terhadap perempuan—pun nyatanya menjadi praktik yang sangat buruk bagi kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketika saya menyebut diri saya seorang feminis, saya tidak melakukannya karena saya pikir saya akan menyelamatkan perempuan. Saya melakukannya karena saya pikir penting bagi laki-laki untuk mengakui bahwa ketika perempuan tidak bebas, laki-laki pun tidak.

—Noah Berlatsky dalam *Can Men Really Be Feminists?* (2014).

Dalam rangka mengurangi adanya kesenjangan gender, pemerintah melalui kebijakan dan program pembangunan telah berusaha mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan

## Data Badan Pusat Statistik (BPS)

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan nasional.

Strategi dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender disebut dengan pengarusutamaan gender, di mana untuk rencana implementasinya diperlukan suatu analisis gender. Oleh karena itu, diperlukan data dan fakta serta informasi tentang gender, yaitu data terpilah antara perempuan dan laki-laki yang dapat menggambarkan kesenjangan gender.

—Dikutip dari pendahuluan Publikasi Perempuan dan Laki-laki Provinsi Kepulauan Riau 2018.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau ternyata sudah rutin setiap tahunnya menerbitkan publikasi

berbasis gender sejak tahun 2011. Tentu saja publikasi ini dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian masalah gender khususnya di Kepulauan Riau. Perempuan dan Laki-laki Provinsi Kepulauan Riau 2018 tidak hanya menyajikan informasi dasar seperti struktur kependudukan, tetapi juga merambat hingga peran kedua jenis kelamin dalam kepemimpinan, politik, dan pemerintahan.

Terlepas dari kapabilitas dan kelebihan tiap jenis kelamin secara psikologis dan fisik, pemerataan peran dan posisi khususnya dalam kepemimpinan dapat dikatakan belum setara di Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum menelisik lebih jauh dan melihat Kepri secara spesifik, kita akan melihat data dengan cakupan nasional.

## Ketimpangan Distribusi Jabatan

Melansir data Sakernas: Distribusi Jabatan Manager Menurut Jenis Kelamin dan Statistik Indonesia 2011 dan 2016 dari BPS, secara nasional, masih ada ketimpangan distribusi jabatan antarjenis kelamin di Indonesia. Namun, dapat dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan angka yang stabil pada perempuan dari distribusi jabatan manager.

Hal ini menunjukkan pula mulai terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk turut andil dalam pekerjaan. Berbeda pada dunia politik, peran perempuan tampaknya belum menunjukkan. Meski angkanya dari tahun 1999 hingga 2009 mengalami peningkatan dalam parlemen DPR, namun terjadi penurunan pada tahun 2014 baik dari DPR maupun DPRD.

Di Provinsi Kepulauan Riau khususnya,

persentase peran perempuan dalam kursi legislatif ternyata tidak menjadi lebih tinggi—bahkan lebih rendah. Dari 45 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, hanya 8 orang yang merupakan perempuan, sementara 37 lainnya adalah laki-laki. Sama halnya dengan kepala desa/lurah yang masih didominasi dengan laki-laki. Dari data Potensi Desa 2018 di Kepulauan Riau.

Dari 400 kepala desa, 384 di antaranya merupakan laki-laki, sementara hanya 16 di antaranya yang merupakan perempuan. Sementara dari 402 sekretaris desa, 333 di antaranya laki-laki dan 69 di antaranya perempuan. Namun, dari data kesenjangan peran perempuan tadi, ada salah satu fakta.

Menariknya yang menunjang kesetaraan gender di Kepulauan Riau, yaitu persentase Pegawai Negeri Sipil

(PNS)—yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN)—di Kepulauan Riau didominasi oleh perempuan dengan persentase 51,42%.

Data tahun 2017 yang dilansir dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut menyatakan bahwa dari 100 PNS, 51 orang adalah perempuan dan 49 orang adalah laki-laki.

Angka-angka mengenai ketimpangan jabatan antarjenis kelamin tersebut merupakan potret nyata terhadap ketidaksetaraan gender itu sendiri. Hambatan dalam rekonstruksi kesetaraan gender nyatanya bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga global. Karena dalam patriarki, laki-laki bukan hanya menghancurkan perempuan, tetapi juga dirinya sendiri. Indonesia butuh para orang tua yang

berani dan tanpa enggan memahami kesetaraan gender, sehingga bisa memberi pemahaman yang baik kepada anak-anaknya.

Kesetaraan gender merupakan isu dunia yang seharusnya tidak hanya diperjuangkan oleh salah satu pihak—perempuan—tetapi seluruh manusia.

(Seluruh isi dalam tulisan ini adalah tanggung jawab penulis)

Penulis merupakan Mahasiswa di Politeknik Statistika STIS Jakarta

## TABEL DATA & GRAFIK

Jenis Kelamin	Distribusi Jabatan Manager Menurut Jenis Kelamin			
	2016	2017	2018	2019
Laki - Laki	75.83	73.37	71.03	69.37
Perempuan	24.17	26.63	28.97	30.63

Parlemen	Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD			
	1999	2004	2009	2014
DPR	8.8	11.82	17.86	17.32
DPRD	-	-	26.52	25.76

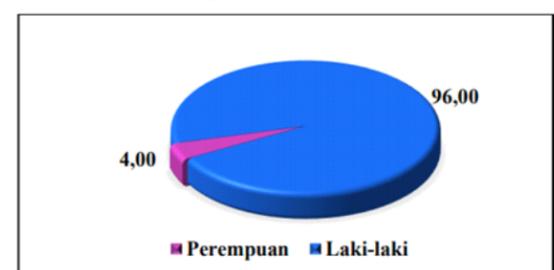
Sumber: Statistik Indonesia 2011 dan 2016, BPS

Gambar 7.4 Persentase Anggota DPRD Provinsi menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 7.3 Persentase Kepala Desa/Lurah menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa, 2018

## WARNING

Untuk millennial muda yang punya hobi menulis kalian bisa mengirimkan tulisan kalian untuk tayang di majalah e-Paper Pelawa yang tayang di portal [kepri.antaraneews.com](http://kepri.antaraneews.com). Tulisan-tulisan tidak harus berupa artikel atau karya ilmiah, tapi kami juga menerima tulisan-

tulisan karya sastra yang bisa kalian kirimkan ke e-mail: [pelawaantara@gmail.com](mailto:pelawaantara@gmail.com). Selain itu kalian wajib follow akun media sosial kami, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar karya tulis kalian dapat dibaca banyak orang dan jangan lupa ikuti juga

channel Telegram kami di [t.me/kepriantera](https://t.me/kepriantera) dan tonton Youtube sesuai alamat dibawah.

"Baca berita dari sumbernya"

Penulis: **Rahmadathul Wisdawati**

Indonesia, negara kepulauan yang indah dengan kekayaan sumber daya alam berlimpah. Tak hanya itu, kekayaan lain Indonesia terletak pada beragamnya kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana keadaan Indonesia, maka akan dipotret melalui Sensus Penduduk 2020. Sehingga diperoleh informasi mengenai berapa jumlah penduduk negeri ini, karakteristik umur, pendidikan, pekerjaan, hingga suku penduduk Indonesia.

Sensus Penduduk merupakan kegiatan pendataan lengkap seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, untuk memperoleh karakteristik populasi Indonesia pada suatu waktu tertentu. Sensus Penduduk dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, di tahun yang berakhir nol sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 dan No. 7 Tahun 1960. Sensus Penduduk terakhir kali dilakukan pada tahun 2010, dan pada tahun ini sedang diselenggarakan Sensus Penduduk 2020.

Sensus Penduduk 2020 Online (SPO) sudah dimulai sejak 15 Februari lalu. Cara ini menawarkan kepraktisan dan kecepatan dalam mengisi data kependudukan. Hanya lima menit Anda perlukan untuk menyeter basis data yang kelak digunakan untuk menentukan masa depan bersama melalui akses laman <http://sensus.bps.go.id/>. serta menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur.

Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 dengan dukungan dari seluruh kementerian, lembaga negara, dan

pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PNK) Muhadjir Effendy mengatakan, ketersediaan satu data yang dibangun melalui Sensus Penduduk sangat dibutuhkan agar koordinasi bisa lebih baik dan intervensi tepat sasaran.

Oleh karena itu, Sensus Penduduk 2020 akan membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang. Sehingga peluang sukses di masa depan akan terbuka luas diberbagai sektor. Begitu pentingnya keterlibatan anak muda dengan serangkaian upaya untuk mengikutsertakan dalam sensus ini. Dengan demikian, Sensus Penduduk 2020 membuka peluang sukses bagi kaum milenial.

Keamanan data yang digunakan pada Sensus Penduduk 2020 akan terjamin aman dari gangguan-gangguan siber yang rawan terjadi di dunia maya karena akan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Apalagi dalam pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2019 lalu, Presiden berpesan bahwa Indonesia antara tahun 2020 - 2024 berada di puncak periode bonus demografi. Dengan data yang kredibel dan valid, proses penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul akan lebih mudah dan terencana.

Tahun ini merupakan terobosan baru Badan Pusat Statistik dengan menerapkan metode kombinasi konvensional (door to door) dengan metode berbasis registrasi (online / administrasi penduduk). Data administrasi yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),

Kementerian Dalam Negeri akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (Zulkipli) berharap setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelopor Sensus Penduduk 2020 dengan melakukan penginputan data pribadi dan keluarga secara mandiri melalui situs [bps.go.id](http://bps.go.id). melalui Focuss Grup Discussion dalam rangka Sensus Penduduk Online tahun 2020 di Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompok, Kamis (6/2/2020).

"Dimana gadget atau handphone sendiri, saat ini sangat akrab dengan masyarakat. Selain itu, hadirnya sistem sensus berbasis online ini juga sangat mengedukasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan informasi", Jelas Zulkipli.

Adapun perhelatan yang diselenggarakan sepuluh tahun sekali ini utamanya ditujukan kepada masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga nantinya petugas tak perlu lagi mendatangi kediamannya untuk disensus. Karena dapat dilakukan kapan saja secara mandiri selama periode pelaksanaan SPO (Sensus Penduduk Online) yaitu hingga tanggal 31 Maret 2020. Selain itu, literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin baik tentang arti penting data, dimulai dari informasi pribadinya.

Sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah dan tatap muka serta imbauan WHO terkait pencegahan laju penyebaran Covid-19 melalui physical distancing, BPS melakukan penyesuaian pelaksanaan

Sensus Penduduk Online sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. Untuk itu, bagi masyarakat yang belum sempat berpartisipasi, BPS akan memperpanjang Sensus Penduduk Online hingga 29 Mei 2020.

Berkat koordinasi, konsolidasi, dan dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah, pelaksanaan SP Online menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Online dari tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020, 32,4 juta penduduk atau sekitar 12,5% penduduk Indonesia telah berpartisipasi dalam periode awal sensus. Sebesar 85,73% kualitas data yang diisikan termasuk dalam kualitas Grade A (Sangat Baik) dan Grade B (Baik). Seluruh data dan informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

**Lalu, bagaimana jika terlewat atau tidak bisa mengakses Sensus Penduduk Online?**

Tenang saja, Anda akan tetap tercatat dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Wawancara pada September 2020. Pastikan Anda turut serta #MencatatIndonesia dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Online pada 15 Februari – 29 Mei 2020. Ketahuilah bahwa #AndaBerarti. Data yang disampaikan sangat diperlukan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.

#SensusPenduduk2020  
#MencatatIndonesia  
#SensusOnline  
#BPS  
#SensusDiRumahAja

## Masyarakat Modern Menuju 'Indonesia Emas'

Dalam kurun waktu kurang lebih 25 tahun mendatang, Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-seratus. Kondisi Indonesia di usia yang ke seratus sepenuhnya berada di tangan rakyatnya, terutama generasi penerus yang akan menjadi pemimpin. Untuk menjadi sebuah negara yang maju, diperlukan perencanaan serta pembangunan yang konsisten. Pertanyaannya adalah, Bagaimana peranan rakyat dalam mensukseskan dirgahayu Indonesia ke-seratus? Siakah kita menyongsong 'Indonesia emas' mendatang? Lantas, bagaimana bisa, menggapai kepedulian terhadap pendidikan tanpa masyarakat yang modern pula?

Masyarakat modern diindikasikan sebagai masyarakat yang menerima hal baru untuk perubahan, mampu menghargai waktu, menghargai dirinya sendiri dan harkat hidup orang lain, serta berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan itu masyarakat modern berusaha agar mereka mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan berusaha agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) hanya sebesar 12,57% (sebanyak 16,26 juta orang) mencakup 2,82% (sebanyak 3,65 juta orang) berpendidikan Diploma I/II/III dan 9,75% (sebanyak 12,61 juta orang) berpendidikan Universitas. Minimnya tenaga kerja ahli masih menjadi PR yang diperbincangkan dalam sidang-sidang di pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap pendidikan, sebelumnya kita juga harus memperbaiki kualitas sumber daya manusianya menjadi modern pula. Mengingat sektor pendidikan merupakan sektor penentu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, hal pertama yang perlu dilakukan adalah merancang konsep dan tujuan. Untuk itu, kunci utama yang perlu dibangun adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai wujud nyata tindakan peningkatan pendidikan rakyat, saya memaparkan beberapa usulan antara lain:

- Membangun karakter yang kokoh meski kurangnya keteladanan. Karakter merupakan ciri khas yang menjadi sebuah jati diri, ciri-ciri

atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Selain itu, jati diri ini harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib masa depan. Apabila memiliki karakter yang tersimpul dalam ideologi dan konstitusi Negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945 maka pendirian tidak akan mudah tergoyahkan oleh hal kecil yang dapat merusak keyakinan besar. Kondisi seperti ini akan memiliki dampak yang baik untuk orang yang sedang menambah ilmu pengetahuan sehingga memiliki arah dan tujuan serta visi dan

misi yang tidak akan mudah terbantahkan jika dihadapkan dengan berbagai kendala yang menghampiri. Akibatnya, pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang dan mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik serta tidak ingin terkalahkan oleh yang lain apabila merasa tertinggal akan pengetahuan yang dimiliki. Orang-orang yang kurang paham mengenai sesuatu hal akan selalu berusaha mencari tahu bahkan merasa malu karena ketidaktahuan yang dimilikinya.

## Biodata Penulis



Rahmadathul Wisdawati, Mahasiswi Politeknik Statistika STIS, Program Studi Diploma Tiga (D3) Statistika, semester 4 (empat), Jakarta Timur. Terlahir dari keluarga sederhana di Kota Tanjungpinang, 14 Juli 1999. Buah cinta kedua Bpk. Suspendi dan Ny. Dra. Elly Riawati. Rahma atau Atul adalah panggilan akrabnya, seorang yang gemar berpikir kritis mampu menggambarkan kepribadiannya. Berbagai penghargaan seni lukis dan kaligrafi serta LCC 4 Pilar MPR RI tingkat nasional pernah diraihinya. Dapat dihubungi melalui [rahmadathulwisdawati@gmail.com](mailto:rahmadathulwisdawati@gmail.com) atau 083183242109